

**POLA MIGRASI DAN URBANISASI DI INDONESIA:
PERSPEKTIF LABOR FORCE ADJUSTMENT
(Studi Kasus Pada 27 Arus Migrasi Antar Propinsi 1990-1995)**

Hafid Setiadi
Jurusan Geografi FMIPA UI
E-mail : hafid_setiadi@hotmail.com

LL

ABSTRAK

Perspektif Labor Force Adjustment menyatakan bahwa pergerakan tenaga kerja antar wilayah merupakan respon dari adanya perbedaan upah dan kesempatan kerja. Di Indonesia, pola pergerakan ini ternyata dipengaruhi oleh paradigma kebijaksanaan mobilitas penduduk yang berkembang sejak tahun 1930-an hingga 1990-an. Berdasarkan pemahaman terhadap perkembangan paradigma tersebut yang dilandasi oleh tiga kerangka teoritis (Law of Migration, Push-Pull Factor Theory, dan Factor Mobility Theory), kajian deskriptif ini menunjukkan bahwa pola migrasi di Indonesia ternyata memiliki kesamaan dengan beberapa fenomena utama dari hukum migrasi Ravenstein. Selain itu ditemukan juga, bahwa migrasi tenaga kerja lebih disebabkan oleh daya tarik wilayah tujuan (perkotaan) dibandingkan oleh daya dorong wilayah asal. Namun tidak seperti halnya hipotesis Lewis, suplai tenaga kerja yang begitu besar ke wilayah perkotaan ternyata tidak diikuti oleh penurunan tingkat upah di kota, sehingga migrasi tenaga kerja antar propinsi di Indonesia tidak mampu memberikan efek pada terciptanya keseimbangan pembangunan regional. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa hipotesis teori mobilitas faktor produksi ternyata tidak terjadi.

ABSTRACT

The Labor Force Adjustment perspective stated that labor mobility as a rational respond to both wage and job opportunities differentiation among regions. However, in Indonesia case, the pattern of labor mobility has also a strong connection to the shifting of paradigms of population mobility policy at the national level since 1930's to 1990's. Through the understanding of those paradigm and relying on three theoretical frameworks (Laws of Migration, Push-Pull Factors Theory, and Factor Mobility Theory), the result of this study shows that both the pattern and the direction of labor mobility in Indonesia has some similarities with the Laws of Migration as told by Ravenstein, such as: sub-urbanization and counter urbanization appearance, a long distance migration to the primate city, and the women predominance in short-distance migration. Beside that, a large number of labor mobility has pulled by a higher level of labor wage in urban sector. But, not like Lewis's hypothesis in Factor Mobility Theory, the massive supply of labor into urban region has not affected on wage balancing development between urban and rural sectors. So, we can say that the labor mobility is not able to create a regional development equilibrium.

1. PENDAHULUAN

Banyak ahli pembangunan yang mengemukakan bahwa kinerja perkembangan suatu wilayah merupakan fungsi dari dinamika kependudukan. Salah satu bentuk dari dinamika tersebut adalah pergerakan atau mobilitas penduduk. Dalam beberapa hal, pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya memiliki keterkaitan dengan persoalan sumber daya manusia dan mekanisme pasar tenaga kerja. Selain itu arah dan besaran pergerakan penduduk yang bergerak akan memberikan pengaruh baik pada wilayah asal, wilayah tujuan, maupun jalur yang dilewatinya. Suatu wilayah yang menerima penduduk dalam jumlah besar bukan saja mendapatkan keuntungan dengan tersedianya tenaga kerja, tetapi juga akan menimbulkan persoalan wilayah dalam bentuk keterbatasan kapasitas pelayanan. Dalam pada itu, wilayah asal akan mengalami kelangkaan tenaga kerja yang mengakibatkan dinamika pembangunan di wilayah bersangkutan akan jauh menurun sehingga tidak dapat mendukung upaya-upaya pengembangannya.

Fenomena mobilitas penduduk sering kali dilihat sebagai refleksi dari sifat saling ketergantungan dan saling melengkapi antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Dalam kaitan ini, mobilitas penduduk atau migrasi dipandang sebagai fungsi dari kesempatan ekonomi. Dalam perspektif ini, tidaklah mengherankan apabila wilayah perkotaan seringkali menjadi tujuan utama kaum migran. Apabila aliran kaum migran ke wilayah perkotaan ini berlangsung secara terus menerus serta dalam jumlah yang relatif besar, maka akan mendorong tingginya laju urbanisasi. Dan pada akhirnya, dalam jangka waktu tertentu, wilayah tersebut akan mengalami keterbatasan daya dukung baik untuk menampung kaum migran yang terus mengalir, maupun untuk mengakomodasikan aktivitas ekonomi yang terus meningkat.

Sehubungan dengan hal di atas, studi ini mencoba untuk membahas mobilitas penduduk atau migrasi dalam perspektif ekonomi di Indonesia tahun 1990 - 1995 yang mana perpindahan penduduk tersebut akan dipandang

sebagai mobilitas faktor produksi, dalam hal ini mobilitas tenaga kerja. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana mobilitas penduduk tersebut memberikan dampak pada urbanisasi dan pembangunan regional di Indonesia.

II. METODOLOGI

Dalam studi ini, perspektif mobilitas tenaga kerja ditempatkan dalam suatu kerangka pikir, bahwa migrasi tenaga kerja merupakan proses yang terbentuk oleh bekerjanya faktor pendorong di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan yang akan berkombinasi membentuk pola migrasi yang khas. Pola migrasi ini akan memberikan indikasi apakah pergerakan tenaga kerja lebih dipengaruhi oleh daya dorong wilayah asal atau daya tarik wilayah tujuan. Selanjutnya pola migrasi yang terbentuk tersebut juga akan dikaji secara deskriptif sejauh mana dampaknya terhadap proses urbanisasi. Adapun tingkat kedalaman kajian akan dibatasi pada tingkat propinsi dengan menggunakan data-data statistik yang telah tersedia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *labor force adjustment* dan teori-teori yang akan diterapkan adalah teori Ravenstein (*Laws of Migration*), Everett Lee (*Pull-Push Factor Theory*), dan Lewis (*Factor Mobility Theory*). Ketiga teori ini dipandang dapat memberikan landasan kerangka pikir yang relevan terhadap fenomena migrasi tenaga kerja berkaitan dengan gejala urbanisasi di negarane-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Untuk melihat kesesuaian antara teori Lewis dengan pergerakan tenaga kerja, studi ini menggunakan faktor ratio produktivitas antara sektor urban dan sektor rural di setiap propinsi yang diolah dari data PDRB dan tenaga kerja sektoral tahun 1995. Faktor ratio ini merupakan pendekatan untuk memperoleh gambaran akan adanya perbedaan daya tarik sektor perkotaan antar propinsi. Selain itu, seperti telah umum digunakan, ratio produktivitas ini juga merupakan gambaran akan adanya perbedaan upah tenaga kerja.

III. TINJAUAN TEORITIS MIGRASI PENDUDUK

Secara akademis, pembahasan mengenai migrasi umumnya dilakukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan *labor force adjustment* dan pendekatan *human capital investment* (Brown dan Lawson, 1985). Pendekatan yang pertama melihat proses migrasi sebagai respon terhadap adanya perbedaan upah dan kesempatan kerja antar wilayah; sedangkan pendekatan yang kedua melihat fenomena migrasi sebagai bentuk investasi sumber daya manusia yang dilakukan secara individual, yang mana "biaya" yang dikeluarkan pada saat melakukan migrasi dipandang sebagai investasi untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan pada masa depan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan *labor force adjustment* lebih berorientasi pada sistem ekonomi secara keseluruhan, sedangkan pendekatan *human capital investment* lebih berorientasi pada kesejahteraan individu. Dari kedua pendekatan tersebut, banyak ahli yang melahirkan serta membahas teori-teori tentang migrasi, di antaranya adalah Ravenstein (*Laws of Migration*), Zipf (*Inverse Distance Model*), Stouffer (*Intervening Opportunities*), dan Everett Lee (*Push and Pull Factors Theory*). Selain itu, dari sudut pandang yang agak berbeda, telah dikembangkan pula Teori Mobilitas Faktor Produksi oleh Lewis yang menempatkan perpindahan penduduk sebagai perpindahan tenaga kerja.

Ravenstein dalam studinya tahun 1880-an di barat laut daratan Inggris mendeskripsikan kaum migran sebagai kelompok masyarakat yang rasional dan memiliki motivasi kuat untuk memperbaiki kehidupan ekonominya. Berkaitan dengan deskripsi tersebut, kaum migran akan bergerak dari wilayah miskin dan kurang berkembang ke wilayah yang lebih maju. Beberapa hal yang ditemukan dalam studinya tersebut dijelaskan secara singkat dalam Gambar 1.

Pada tahun 1966, Everett Lee mengembangkan model migrasi penduduk sebagai akibat bekerjanya faktor pendorong (*push factor*) di daerah asal dan faktor penarik (*pull factor*) di

daerah tujuan. Faktor pendorong di daerah asal dapat berupa kesempatan kerja yang langka, semakin besarnya tekanan terhadap lahan-tanah pertanian, atau tingkat upah yang rendah. Sementara itu, faktor penarik di daerah tujuan antara lain adalah tersedianya alternatif pekerjaan, tingkat upah yang lebih tinggi, dan suasana kehidupan yang lebih nyaman. Lee menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi daya tarik di atas lebih merupakan 'imajinasi' atau 'harapan' yang berkembang dalam pikiran kaum migran. Apa yang dibayangkan tersebut belum tentu sama dengan keadaan yang sesungguhnya di daerah tujuan. Oleh karena itu, proses migrasi dalam jumlah besar yang masuk ke satu wilayah karena kuatnya faktor penarik, seringkali menyebabkan tidak seimbangnya kemampuan daya dukung wilayah penerima tersebut dengan jumlah migran yang masuk. Gejala ini sering disebut dengan urbanisasi berlebih (*over urbanization*). Suatu wilayah yang sudah memasuki tahap urbanisasi berlebih ini, akan mendorong terjadinya pelimpahan (*spill over*) ke wilayah sekitarnya (Gambar 2).

Sementara itu dalam perspektif ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah, fenomena migrasi dipandang sebagai perpindahan faktor produksi dari satu wilayah ke wilayah lainnya (Teori Mobilitas Faktor). Dalam kaitan ini perpindahan penduduk identik dengan perpindahan tenaga kerja. Oleh karena faktor pendorong utama migrasi tenaga kerja adalah adanya perbedaan tingkat upah dan kesempatan kerja antar wilayah. Tenaga kerja akan bergerak dari wilayah yang berupah rendah ke wilayah yang berupah tinggi. Teori ini berpendapat bahwa mengalimya tenaga kerja ke wilayah yang berupah tinggi akan menyebabkan menurunnya tingkat upah. Penurunan tingkat upah ini sejalan dengan hukum penawaran di mana peningkatan suplai akan menurunkan harga. Pada sisi lain, di wilayah yang berupah rendah terjadi peningkatan upah, karena kelangkaan tenaga kerja yang disebabkan migrasi keluar. Oleh karena itu, dalam jangka panjang akan terjadi keseimbangan tingkat upah antara wilayah tujuan dengan wilayah asal tenaga kerja. Menurut teori ini, bila keseimbangan tersebut terjadi maka per-

pindahan atau mobilitas penduduk antar dua wilayah tersebut akan berhenti. Secara hipotesis, penjelasan di atas diringkas Gambar 3.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1930-an, mobilitas penduduk (migrasi) sangat dipengaruhi oleh 'paradigma kolonial' yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi kepentingan eksploitasi perkebunan di daratan Sumatera. Selanjutnya, pada awal kemerdekaan hingga Repelita IV berkembang 'paradigma transmigrasi' yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk Pulau Jawa dengan cara memindahkannya ke luar Jawa. Paradigma ini telah berhasil memindahkan ratusan ribu kepala keluarga dari wilayah pedesaan di Pulau Jawa ke wilayah pedalaman di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Akhir-akhir ini paradigma transmigrasi di atas telah tergeser oleh 'paradigma ekonomi', yang lebih besar dan arah mobilitas penduduknya lebih ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi secara rasional. Dalam paradigma ini proses mobilitas penduduk akan mengikuti mekanisme pasar tenaga kerja. Selain itu, keputusan untuk bermobilitas atau bermigrasi ditentukan secara individu oleh kaum migran, yang mana hal ini tidak berlaku pada dua paradigma sebelumnya.

Berdasarkan paradigma di atas, fenomena migrasi antar pulau dan propinsi di Indonesia memberikan gambaran adanya pergeseran arah dan besar, sesuai dengan paradigma yang melatarbelakanginya, seperti ditunjukkan Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 memperlihatkan jumlah dan arah migrasi penduduk tahun 1930 didominasi oleh pergerakan dari 'inner' (Jawa-Madura-Bali) ke arah 'outer' (Sumatera) serta pergerakan intra wilayah 'inner'. Apabila dilihat dari jumlahnya, pergerakan penduduk pada tahun 1971 juga masih didominasi oleh pergerakan 'inner' ke 'outer' dan pergerakan intra 'inner'. Tetapi ditinjau dari pertumbuhannya, terlihat pergerakan dari 'outer' ke 'inner' mengalami tingkat per-

tumbuhan tertinggi. Dari Tabel 2 terungkap, bahwa pada tahun 1971 lebih dari 50% total pergerakan migran mengarah ke Pulau Jawa, meskipun pergerakan ke luar Jawa masih tetap mendominasi.

Bila ditinjau pada skala yang lebih detail di tingkat propinsi, terlihat bahwa pada tahun 1971 dan 1980 propinsi Lampung dan DKI Jakarta memiliki nilai migrasi netto yang terbesar (Tabel 3). Hal ini mengindikasikan, bahwa kedua propinsi tersebut menjadi tujuan utama migrasi di Indonesia. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar terhadap proses migrasi masuk di kedua propinsi tersebut. Migrasi masuk di propinsi Lampung didominasi oleh program transmigrasi yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang ditunjukkan oleh tingginya angka migrasi keluar yang relatif besar pada ketiga propinsi Jawa tersebut. Hasil penelitian Hugo (1979) menunjukkan, bahwa proporsi transmigran terhadap total penduduk Lampung mencapai lebih dari 35%. Berbeda dengan Lampung, kaum migran yang masuk ke DKI Jakarta lebih disebabkan karena tingginya daya tarik Jakarta sebagai ibu kota negara dalam menawarkan kesempatan ekonomi dan peluang kerja yang lebih baik. Dalam proses selanjutnya, tingginya daya tarik Jakarta memberikan imbas pada wilayah-wilayah pinggirannya, termasuk ke propinsi Jawa Barat. Sehingga pada tahun 1980, Jawa Barat juga mulai merasakan besarnya arus migran yang masuk, terutama yang menuju wilayah-wilayah di pinggir Jakarta yaitu Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Tingginya migrasi masuk ke Lampung dan DKI Jakarta di atas juga memberikan pertanda telah terjadinya benturan antara paradigma 'transmigrasi' dan paradigma 'ekonomi' dalam proses migrasi di Indonesia. Dari data yang tercantum pada Tabel 3 terlihat indikasi yang cukup kuat, bahwa benturan paradigma di atas ternyata telah 'dimenangkan' oleh paradigma ekonomi. Paradigma ekonomi ini mendorong terjadinya polarisasi arus migrasi ke arah Jawa. Pada tahun 1990, propinsi Jawa Barat muncul sebagai propinsi utama penerima mig-

ran melebihi DKI Jakarta, yang kemudian diikuti oleh kemunculan Jawa Timur pada tahun 1995. Kemunculan Jawa Barat sebagai wilayah penerima migran utama ini antara lain disebabkan terjadinya perpindahan penduduk dari DKI Jakarta ke arah pinggirannya (Botabek) yang notabene merupakan bagian dari Jawa Barat. Sementara itu, propinsi Lampung pada tahun 1971 memiliki angka migrasi netto positif tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, terus mengalami penurunan hingga mencapai angka negatif pada tahun 1995. Migrasi netto yang bernilai negatif ini bukan disebabkan oleh meningkatnya arus migrasi ke luar, tetapi oleh penurunan secara drastis arus migrasi masuk dari 13% di tahun 1980 menjadi hanya 4% pada tahun 1990. Hal ini diduga karena menurunnya jumlah transmigran yang dikirim ke propinsi ini. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pada akhir tahun 1995 arus migrasi telah terpolarisasi ke Pulau Jawa, seiring dengan turunnya peranan Sumatera sebagai wilayah penerima migran.

Dominasi Jawa dalam fenomena migrasi di Indonesia selama kurun waktu 1990 - 1995 semakin tampak apabila kita perhatikan 20 arus migrasi tertinggi di Indonesia yang disajikan Tabel 4. Dari tabel tersebut terlihat, bahwa 20 arus migrasi terbesar merupakan migrasi intra wilayah di Pulau Jawa. Sebagian besar kaum migran dari propinsi-propinsi di Jawa bergerak menuju wilayah perkotaan di Jawa Barat, dan sebagian besar dari mereka adalah kaum perempuan. Gejala ini tidaklah mengherankan, karena di Jawa Barat terdapat dua kutub utama yang memiliki daya tarik kuat bagi kaum migran yaitu wilayah Botabek (yang telah terintegrasi dengan DKI Jakarta) dan wilayah di sekitar Kota Bandung. Kedua kutub tersebut merupakan pusat kegiatan industri, perdagangan, dan jasa pelayanan yang banyak membutuhkan tenaga kerja wanita.

Fakta yang hampir serupa juga terjadi pada arus migrasi antara Jawa dan luar Jawa (Tabel 5). Dominasi arus masuk berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung yang sebagian besar menuju DKI Jakarta dan wilayah perkotaan

Jawa Barat. Pada arus masuk ke Jawa ini, dominasi kaum perempuan tidak tampak lagi. Sementara itu, arus ke luar Jawa sebagian besar berasal dari Jawa Timur menuju wilayah perkotaan Kalimantan Timur yang umumnya dilakukan oleh kaum pria. Dengan demikian baik arus masuk ataupun arus keluar Jawa cenderung bersifat satu arah, yaitu arus masuk berasal dari Sumatera dan arus keluar menuju Kalimantan. Pada sisi lain, pergerakan penduduk antar propinsi di luar Jawa sebagian besar terjadi di Sumatera yang didominasi oleh kaum perempuan (Tabel 6). Kaum perempuan ini umumnya bergerak menuju wilayah pedesaan di propinsi-propinsi yang berbatasan langsung dengan propinsi asal. Adapun wilayah perkotaan yang menjadi tujuan utama kaum migran perempuan di Sumatera, adalah wilayah perkotaan di Sumatera Utara dan Riau.

Secara teoritis, apabila proses migrasi didorong oleh daya tarik sektor perkotaan maka arus migrasi akan bergerak dari wilayah yang perbandingan produktivitas urban-rural rendah ke wilayah yang perbandingannya tinggi. Hal ini dikarenakan produktivitas merupakan *proxy* dari pendapatan pekerja. Makin tinggi produktivitas, makin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh pekerja. Selain itu, secara teoritis, arus migrasi juga akan menuju pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh kasus, akan dipilih 27 arus migrasi utama di Indonesia yang telah diidentifikasi pada Tabel 4, 5, dan 6. Ringkasan dari contoh kasus tersebut disajikan pada Tabel 7.

Dari Tabel 7 di atas terungkap, bahwa sebagian besar arus migran pada tahun 1990-1995 bergerak dari wilayah yang memiliki produktivitas rendah ke tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Teori Mobilitas Faktor Produksi, bahwa tenaga kerja akan berpindah dari wilayah yang memiliki tingkat upah rendah (produktivitas rendah) ke wilayah berupah tinggi (produktivitas tinggi). Dalam 27 kasus di atas, penyimpangan terjadi pada 6 kasus yaitu arus migrasi DKI Jakarta ke Jawa Barat, Jawa Tengah ke Jawa Timur, DKI Jakarta ke Jawa Tengah, Sumatera Barat ke Riau, Sumatera

Selatan ke Lampung, dan Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara.

Arus migrasi DKI Jakarta yang bergerak ke arah wilayah yang berupah lebih rendah di Jawa Barat, lebih disebabkan telah jenuhnya wilayah DKI Jakarta dari aktivitas perkotaan yang menyebabkan kegiatan industri dan permukiman mulai bergeser ke arah pinggiran masuk ke Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8 yang mana tingkat urbanisasi di DKI Jakarta telah mencapai 100%, sedangkan Jawa Barat baru mencapai 44%. Karena wilayah pinggiran ini sudah terintegrasi dengan DKI Jakarta, maka perpindahan penduduk dan tenaga kerja sama sekali tidak mengurangi keuntungan urbanisasi yang diperoleh. Tingkat upah dan tingkat pelayanan fasilitas yang diterima oleh kaum migran tidak jauh berbeda dengan yang diterima sebelum pindah. Apalagi bila proses perpindahan tersebut hanya menyangkut perpindahan tempat tinggal, bukan perpindahan pekerjaan. Hal yang serupa terjadi juga pada arus migrasi Jawa Tengah ke Jawa Timur, dimana sebagian besar kaum migran masuk ke wilayah pinggiran Surabaya yang merupakan pusat industri, jasa, dan perdagangan terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Dengan perbedaan produktivitas yang tidak terlalu jauh, arus migran Jawa Tengah ke Jawa Timur di yakini tidak akan berdampak pada turunnya keuntungan, karena tingkat urbanisasi di Jawa Timur ternyata lebih tinggi dari di Jawa Tengah. Demikian juga dengan arus migrasi dari Sumatera Barat ke Riau yang sesungguhnya merupakan arus migrasi ke arah wilayah yang memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi. Sementara itu, arus migrasi Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara yang memiliki produktivitas dan tingkat urbanisasi yang lebih rendah, diduga didorong oleh keterbatasan daya dukung fisik dan persediaan tanah untuk usaha pertanian. Hal ini mengingat kepadatan penduduk Sulawesi Selatan yang lebih tinggi (125 jiwa/km² berbanding 42 jiwa/km²) dengan luas potensi tanah pertanian yang lebih sempit.

Selanjutnya, dengan memperhatikan kembali Tabel 8., terlihat bahwa arus masuk

migrasi yang cenderung masuk ke wilayah perkotaan telah memberikan dampak pada dinamika urbanisasi pada setiap propinsi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua propinsi di Jawa masuk ke dalam kategori 10 besar dalam hal urbanisasi. Dinamika urbanisasi yang tinggi terdapat di DKI Jakarta, DIY, dan Jawa Barat. Dua propinsi pertama merupakan propinsi yang berbentuk 'kota', namun mengalami dinamika yang berbeda. DKI Jakarta telah mencapai tingkat urbanisasi berlebih, karena arus migran masuk sudah demikian besar dan melampaui batas daya dukungnya. Sementara DIY justru mengalami penurunan karena propinsi ini lebih berperan sebagai pengirim kaum migran, ketimbang penerima kaum migran. Adapun Jawa Barat menduduki urutan keempat dengan pertumbuhan urbanisasi yang relatif lebih cepat dibandingkan propinsi lainnya. Hal ini sudah diduga karena propinsi ini merupakan wilayah tujuan utama kaum migran di Indonesia.

Propinsi di luar Jawa yang mengalami urbanisasi yang relatif tinggi adalah Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Propinsi-propinsi di Kalimantan mengalami urbanisasi yang cukup tinggi, karena konsentrasi penduduk hanya terjadi pada wilayah-wilayah tertentu saja yang sudah maju, sehingga sebagian besar penduduk hidup pada 'suasana kota'. Sementara itu tingkat urbanisasi yang tinggi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Bali diduga kuat didorong oleh pergerakan penduduk di dalam propinsi bersangkutan (intra-regional) dan antar propinsi yang bertetangga. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa ketiga propinsi tersebut bukan merupakan tujuan utama arus migrasi antar propinsi.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa sebagian besar arus migrasi di Indonesia pada tahun 1990-1995 didorong oleh tingginya daya tarik sektor perkotaan, terutama dalam bentuk upah pekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kaum migran adalah kelompok masyarakat yang tergolong mampu untuk berkompetisi. Gejala ini berbeda dengan masa sebelum tahun 1990-an di mana se-

bagian besar kaum migran merupakan masyarakat miskin di pedesaan yang melakukan migrasi (dalam bentuk transmigrasi) karena adanya faktor pendorong di tempat asal.

Selain itu, arus migrasi di Indonesia umumnya juga menuju wilayah yang memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, arus migrasi di Indonesia cenderung mendorong tingginya dinamika urbanisasi pada wilayah-wilayah tertentu saja yang akan memberikan dampak kuat pada timbulnya ketidakseimbangan pembangunan. Indikasi ini nampak jelas dengan temuan yang menunjukkan, bahwa arus migrasi dalam jumlah besar yang masuk ke DKI Jakarta dan wilayah perkotaan Jawa Barat tidak memberikan efek keseimbangan berupa 'penurunan harga' tenaga kerja, seperti yang diharapkan oleh Lewis.

V. KESIMPULAN

Secara umum, kesimpulan yang dapat ditarik dari studi ini tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dari beberapa studi mengenai migrasi terdahulu, yang menunjukkan bahwa Jawa dan Sumatera menjadi dua wilayah utama dalam fenomena migrasi tenaga kerja di Indonesia. Namun demikian, terdapat catatan penting yang perlu diungkapkan sebagai hasil kesimpulan studi ini, yaitu :

1. Fenomena migrasi di Indonesia memiliki kesamaan dengan temuan Ravenstein yaitu dalam hal ditemukannya gejala sub urbanisasi dan *counter* urbanisasi, besarnya arus migrasi menuju kota-kota besar, dan dominasi migran perempuan pada migrasi berjarak dekat.
2. Pergerakan kaum migran di Indonesia selama kurun waktu 1990-1995 lebih disebabkan oleh kuatnya daya tarik sektor perkotaan dan tingginya tingkat urbanisasi di wilayah tujuan, dibandingkan daya dorong wilayah asal.
3. Masuknya kaum migran ke wilayah yang berupah lebih tinggi ternyata tidak diikuti oleh penurunan tingkat upah di wilayah

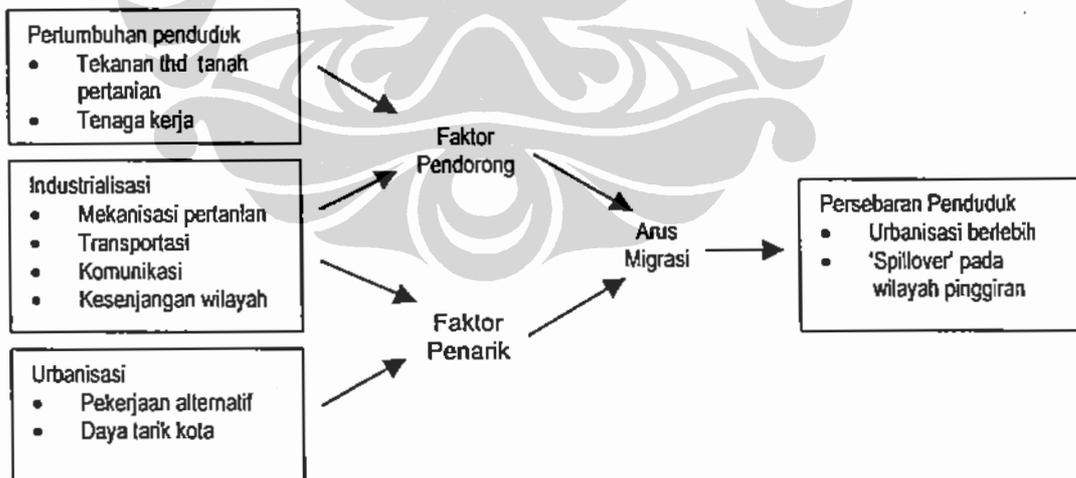
bersangkutan, sehingga tidak menciptakan efek keseimbangan.

DAFTAR ACUAN

- Biro Pusat Statistik. 1999. *Statistik Indonesia 1998*. Jakarta.
- Book, P.G. and I.F. Rothenberg, 1979. *Internal Migration Policy and New Towns : The Mexican Experience*. Urbana : University of Illinois.
- Brown, L.A and V.A. Lawson, 1985. "Migration in Third World Settings, Uneven Development, and Conventional Modeling : A Case Study of Costa Rica" *Annals of The Association of American Geographers Vol 75 No. 1 March 1985*. Washington.
- Chatib, 1999. *Migrasi Risen Antar Propinsi di Indonesia 1990-1995 : Pengujian Model Interaksi Spasial dengan Data SUPAS 1995*. Depok : Lembaga Demografi FE-UI.
- Hugo, G.J., 1979. "Indonesia : Pattern of Population Movement 1971", *Migration and Development in South East Asia : Demographic Perspective* Edited by R.J Pryor. Kuala Lumpur : Oxford University Press.
- Nagle, Garret, 2000. *Advanced Geography*, New York : Oxford University Press.
- Stilwell, Frank., 1992. *Understanding Cities and Region : Spatial Political Economy*. NSW : Pluto Press

Fakta yang ditemukan	Penjelasan terhadap fakta
Migrasi terjadi dalam jarak dekat	Terdapat keterbatasan teknologi, transportasi, dan informasi. Penduduk lebih banyak mengenal kesempatan-kesempatan lokal
Migrasi terjadi dalam beberapa tahap	Penduduk bergerak dari desa ke kota kecil, kemudian ke kota menengah hingga kota besar. Fenomena migrasi 'terjebak' dalam hirarki kota.
Selain terdapat pergerakan ke arah kota besar, juga terdapat pergerakan dispersal menjauhi kota besar.	Penduduk yang lebih mampu bergerak menjauhi kota dan melakukan komuter dari wilayah pedesaan di pinggiran kota (merupakan tahap awal terjadinya <i>suburbanisation</i> dan <i>counter-urbanisation</i>)
Migrasi terjadi dalam jarak jauh menuju kota besar	Penduduk hanya mengeluhui kesempatan-kesempatan di kota-kota besar yang jauh dari daerah asalnya.
Penduduk kota lebih sedikit melakukan migrasi dari pada penduduk desa	Wilayah pedesaan tidak menjanjikan peluang atau kesempatan yang lebih baik.
Wanita lebih banyak bermigrasi dibandingkan pria dalam jarak dekat	Terutama terjadi pada wanita yang telah menikah dan pada masyarakat di mana status sosial wanita relatif rendah
Migrasi meningkat seiring kemajuan teknologi	Digerakkan oleh kemajuan pada bidang transportasi, komunikasi, dan informasi

Gambar 1. Pola Migrasi Ravenstein
(Sumber: Nagle, 2000)



Gambar 2. Push & Pull Factor dalam Proses Migrasi
(Sumber: Book & Rothemberg, 1979)

	Wilayah A	Wilayah B
Sektor ekonomi	Sektor perkotaan 'produktif' Sektor perdesaan 'tidak produktif'	Sektor perkotaan 'tidak produktif' Sektor perdesaan 'produktif'
Perbandingan produktivitas sektor perkotaan terhadap sektor perdesaan	Tinggi	Rendah
Kesempatan kerja	Bervariasi	Terbatas
Kondisi tenaga kerja	"Langka"	"Melimpah"
Tingkat Upah	Tinggi	Rendah
Arus migrasi tenaga kerja	Migrasi masuk	Migrasi keluar
Efek keseimbangan	Upah pekerja menurun	Upah pekerja meningkat

Gambar 3. Model Migrasi Inter-Wilayah
(Sumber : Stilwell, 1992 dengan modifikasi)

Tabel 1. Jumlah dan Arah Migrasi di Indonesia tahun 1930 dan 1971

Arah migrasi	Jumlah migran (dalam juta orang)		% migran (1930-1971)
	1930	1971	
Inner to outer Indonesia	0.88	1.53	171
Outer to inner Indonesia	0.06	0.58	902
Within inner Indonesia	0.74	2.21	295
Within outer Indonesia	0.27	0.98	369

Sumber : Hugo (1979)

Tabel 2. Persentase Migrasi Antar Pulau di Indonesia 1971-1995

Pulau	1971			1980			1990			1995		
	Masuk	Keluar	Netto									
Sumatra	38.33	21.28	17.05	61.53	7.68	53.85	30.57	24.05	6.52	19.01	31.52	(12.51)
Jawa	51.02	65.68	(14.66)	13.20	76.46	(63.26)	34.39	53.14	(18.75)	45.84	39.48	6.36
Kalimantan	3.17	3.58	(0.41)	10.39	2.03	8.36	15.40	7.11	8.29	13.57	9.27	4.30
Sulawesi	5.07	6.38	(1.31)	9.36	6.25	3.11	8.44	7.91	0.53	10.34	9.49	0.85
Kep. Lain	2.42	3.09	(0.68)	5.52	7.58	(2.06)	11.20	7.79	3.41	11.24	10.24	1.00
Total	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-

Keterangan :

1. Data tahun 1971 diolah dari Hugo (1979), merupakan persentase migrasi "life time"
2. Data tahun 1980, 1990, 1995 dikulip dari Chatib (1999), merupakan persentase migrasi "recent"

Tabel 3. Pola Migrasi Antar Propinsi di Indonesia tahun 1971,1980,1990, dan 1995

Propinsi	1971			1980			1990			1995		
	Masuk	Keluar	Net.	Masuk	Keluar	Net.	Masuk	Keluar	Net.	Masuk	Keluar	Net.
DI Aceh	1,24	1,65	-0,41	1,37	0,79	0,58	1,07	0,96	0,12	0,67	1,16	-0,49
Sumut	8,22	4,34	3,88	2,57	4,98	-2,41	2,05	5,38	-3,32	2,42	4,77	-2,35
Sumbar	3,61	4,75	-1,14	2,50	4,30	-1,80	2,46	3,35	-0,90	3,25	3,47	-0,22
Riau	3,24	2,01	1,23	2,65	1,51	1,14	4,67	1,80	2,88	3,46	3,03	0,43
Jambi	2,32	1,52	0,79	2,88	1,02	1,86	2,60	1,24	1,36	1,34	1,26	0,07
Sumsel	5,20	4,83	0,37	5,94	3,71	2,23	4,04	3,85	0,19	3,00	4,49	-1,49
Bengkulu	3,61	0,58	0,02	1,80	0,45	1,35	1,58	0,55	1,02	1,55	0,86	0,69
Lampung	13,90	1,61	12,29	13,63	1,28	12,35	4,04	2,63	1,14	2,68	3,98	-1,30
DKI Jkt.	25,41	6,93	18,49	20,58	10,73	9,84	15,86	19,24	-3,38	13,95	19,75	-5,80
Jabar	9,49	18,77	-9,29	14,82	13,15	1,67	25,72	9,60	16,12	26,23	10,77	15,46
Jateng	8,23	24,63	-16,40	4,93	25,50	-20,57	7,33	22,46	-15,13	8,26	17,57	-9,31
DIY	1,98	4,10	-2,12	2,65	2,05	0,61	3,08	2,34	0,74	3,88	2,66	1,22
Jatim	5,91	11,24	-5,34	5,46	16,02	-10,56	6,26	12,54	-6,28	10,29	9,85	0,44
Bali	0,62	1,02	-0,39	1,00	1,47	-0,47	1,26	1,09	0,17	1,37	1,09	0,28
NTB	0,63	0,34	0,29	0,70	1,09	-0,39	0,71	0,71	-0,00	1,08	0,84	0,24
NTT	0,39	0,43	-0,04	0,70	0,97	-0,28	0,52	0,88	-0,37	0,77	1,04	-0,27
Timtim	-	-	-	0,00	0,11	-0,11	0,50	0,26	0,24	0,50	0,30	0,20
Kalbar	0,42	0,81	-0,39	1,06	0,80	0,26	0,83	0,87	-0,03	1,05	0,82	0,23
Kalteng	0,80	0,38	0,41	1,33	0,45	0,89	1,50	0,72	0,78	0,86	1,03	-0,18
Kalsel	1,35	1,55	-0,20	1,66	1,29	0,36	1,87	1,48	0,39	1,62	1,35	0,27
Kaltim	0,61	0,84	-0,23	3,02	0,57	2,45	3,70	1,32	2,38	3,25	1,82	1,43
Sulut	0,66	1,01	0,65	1,22	1,07	0,15	0,66	0,99	-0,33	0,51	1,16	-0,64
Sulteng	0,86	0,94	-0,08	2,24	0,49	1,76	1,33	0,54	0,79	1,66	0,67	0,99
Sulsel	2,02	3,88	-1,87	1,75	4,15	-2,40	2,27	3,12	-0,84	3,22	3,58	-0,36
Sultra	0,53	0,54	-0,01	1,37	0,83	0,54	1,35	0,71	0,64	1,34	0,93	0,41
Maluku	0,77	0,89	-0,12	1,26	0,76	0,50	1,31	0,75	0,55	0,54	1,10	-0,56
Irian Jaya	-	0,42	-0,42	0,90	0,45	0,44	1,40	0,61	0,79	1,25	0,64	0,61
Total	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: Diolah dari Hugo (1979) dan Chalib(1999)

Tabel 4.
Peringkat 20 Arus Migrasi Terbesar Antar Propinsi 1990-1995

No.	Propinsi Asal	Propinsi Tujuan	Karakteristik Propinsi Tujuan	Jumlah Migran	Jenis Kelamin Migran
1.	DKI Jakarta	Jawa Barat	Perkotaan	206 629	Laki-laki
2.	DKI Jakarta	Jawa Barat	Perdesaan	196 171	Perempuan
3.	Jawa Tengah	DKI Jakarta	Perkotaan	124 576	Perempuan
4.	Jawa Barat	DKI Jakarta	Perkotaan	104 887	Perempuan
5.	Jawa Tengah	Jawa Barat	Perkotaan	103 032	Perempuan
6.	Jawa Tengah	Jawa Barat	Perkotaan	99 884	Laki-laki
7.	Jawa Barat	DKI Jakarta	Perkotaan	79 399	Laki-laki
8.	Jawa Tengah	DKI Jakarta	Perkotaan	78 020	Laki-laki
9.	DKI Jakarta	Jawa Barat	Perdesaan	70 620	Laki-laki
10.	DKI Jakarta	Jawa Barat	Perdesaan	67 611	Perempuan
11.	Jawa Timur	Jawa Barat	Perkotaan	39 224	Perempuan
12.	Jawa Timur	Jawa Barat	Perkotaan	34 278	Laki-laki
13.	DKI Jakarta	Jawa Tengah	Perdesaan	33 608	Laki-laki
14.	Jawa Tengah	DIYogyakarta	Perkotaan	33 557	Perempuan
15.	Jawa Tengah	Jawa Timur	Perkotaan	31 677	Laki-laki
16.	Jawa Timur	DKI Jakarta	Perkotaan	31 028	Perempuan
17.	Jawa Tengah	Jawa Timur	Perkotaan	28 899	Perempuan
18.	DKI Jakarta	Jawa Tengah	Perdesaan	28 453	Perempuan
19.	Jawa Timur	DKI Jakarta	Perkotaan	28 240	Laki-laki
20.	Jawa Barat	Jawa Tengah	Perdesaan	25 275	Laki-laki

Sumber : Chalib (1999)

Tabel 5.
Peringkat 15 Arus Migrasi Terbesar Antara Propinsi Jawa dan Luar Jawa 1990-1995

No.	Propinsi Asal	Propinsi Tujuan	Karakteristik Propinsi Tujuan	Jumlah Migran	Jenis Kelamin Migran
1.	Jawa Timur	Kalimantan Timur	Perkotaan	16 031	Laki-laki
2.	Sumatera Utara	DKI Jakarta	Perkotaan	15 425	Perempuan
3.	Sumatera Utara	Jawa Barat	Perkotaan	14 603	Laki-laki
4.	Lampung	Jawa Barat	Perkotaan	14 568	Perempuan
5.	Sumatera Utara	DKI Jakarta	Perkotaan	14 433	Laki-laki
6.	Lampung	DKI Jakarta	Perkotaan	13 958	Laki-laki
7.	Jawa Timur	Bali	Perkotaan	13 460	Laki-laki
8.	Jawa Timur	Kalimantan Timur	Perkotaan	13 185	Perempuan
9.	Sumatera Selatan	Jawa Barat	Perkotaan	12 511	Laki-laki
10.	Sumatera Barat	DKI Jakarta	Perkotaan	12 355	Perempuan
11.	Sumatera Utara	Jawa Barat	Perkotaan	12 322	Perempuan
12.	Sumatera Barat	DKI Jakarta	Perkotaan	12 245	Laki-laki
13.	Lampung	Jawa Barat	Perdesaan	12 082	Laki-laki
14.	Jawa Timur	Kalimantan Timur	Perdesaan	11 987	Laki-laki
15.	Lampung	Jawa Timur	Perdesaan	10 881	Perempuan

Sumber: Diolah dari Chalib (1999)

Tabel 6.
Peringkat 10 Arus Migrasi Terbesar Antar Propinsi Luar Jawa 1990-1995

No.	Propinsi Asal	Propinsi Tujuan	Karakteristik Propinsi Tujuan	Jumlah Migran	Jenis Kelamin Migran
1.	Sumatera Utara	Riau	Perdesaan	17 546	Laki-laki
2.	Sumatera Utara	Riau	Perdesaan	16 630	Perempuan
3.	Lampung	Sumatera Selatan	Perdesaan	15 322	Laki-laki
4.	Sumatera Barat	Riau	Perkotaan	14 390	Perempuan
5.	Riau	Sumatera Barat	Perdesaan	13 967	Laki-laki
6.	DI Aceh	Sumatera Utara	Perkotaan	12 301	Perempuan
7.	Lampung	Sumatera Selatan	Perdesaan	11 476	Perempuan
8.	Riau	Sumatera Barat	Perdesaan	10 080	Perempuan
9.	Sumatera Selatan	Lampung	Perdesaan	9 614	Perempuan
10.	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Perdesaan	9 078	Perempuan

Sumber: Diolah dari Chalib (1999)

Tabel 7. Arah Migrasi dan Perbandingan Produktivitas Sektor Urban-Rural Pada 27 Arus Migrasi Utama Antar Propinsi di Indonesia 1995

No.	Propinsi Asal	Produktivitas Urban/rural	Propinsi Tujuan	Produktivitas Urban/rural
1.	DKI Jakarta	196,50	Jawa Barat	6,54
2.	Jawa Tengah	3,69	DKI Jakarta	196,50
3.	Jawa Barat	6,54	DKI Jakarta	196,50
4.	Jawa Tengah	3,69	Jawa Barat	6,54
5.	Jawa Timur	3,41	Jawa Barat	6,54
6.	Jawa Tengah	3,69	Jawa Timur	3,41
7.	Jawa Tengah	3,69	DI Yogyakarta	4,87
8.	Jawa Timur	3,41	DKI Jakarta	196,50
9.	DKI Jakarta	196,50	Jawa Tengah	3,69
10.	Jawa Timur	3,41	Kalimantan Timur	4,60
11.	Sumatera Utara	2,37	DKI Jakarta	196,50
12.	Sumatera Utara	2,37	Jawa Barat	6,54
13.	Lampung	1,74	Jawa Barat	6,54
14.	Lampung	1,74	DKI Jakarta	196,50
15.	Jawa Timur	3,41	Bali	4,66
16.	Sumatera Selatan	1,79	Jawa Barat	6,54
17.	Sumatera Barat	3,10	DKI Jakarta	196,54
18.	Lampung	1,74	Jawa Timur	3,41
19.	Sumatera Utara	2,37	Riau	2,71
20.	Lampung	1,74	Sumatera Selatan	1,79
21.	Sumatera Barat	3,10	Riau	2,71
22.	Riau	2,71	Sumatera Barat	3,10
23.	DI Aceh	1,76	Sumatera Utara	2,37
24.	Lampung	1,74	Sumatera Selatan	1,79
25.	Riau	2,71	Sumatera Barat	3,10
26.	Sumatera Selatan	1,79	Lampung	1,74
27.	Sulawesi Selatan	2,46	Sulawesi Tenggara	1,74

Sumber: Diolah dari data base LPEM UI dan Statistik Indonesia 1998

Tabel 8.
Peringkat Sepuluh Besar Urbanisasi di Indonesia 1980-1995

1980			1990			1995		
Rank	Propinsi	% Urban	Rank	Propinsi	% Urban	Rank	Propinsi	% Urban
1	DKI Jakarta	93,36	1	DKI Jakarta	100,00	1	DKI Jakarta	100,00
2	Kaltim	39,84	2	DIY	58,05	2	DIY	52,36
3	Sumsel	27,37	3	Kaltim	50,22	3	Kaltim	50,50
4	Riau	27,12	4	Jabar	42,69	4	Jabar	44,65
5	Sumut	25,45	5	Sumut	41,09	5	Sumut	42,65
6	DIY	22,08	6	Riau	34,36	6	Bali	36,73
7	Kalsel	21,35	7	Bali	34,31	7	Riau	35,39
8	Jabar	21,02	8	Jatim	32,06	8	Jatim	33,40
9	Jatim	19,60	9	Jateng	31,90	9	Jateng	33,30
10	Jateng	18,74	10	Sumsel	30,31	10	Kalsel	30,79
	INDONESIA	22,27		INDONESIA	35,91		INDONESIA	37,07

Sumber : 1. Data tahun 1980 dan 1990 diolah dari Kuncoro (1997)
2. Data tahun 1995 diolah dari data base LPEM UI